

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN

Penggunaan identitas agama yang dipolitisasi pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu disebabkan oleh ucapan Basuki Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu yang dianggap menista agama islam. Kemudian terjadinya gerakan-gerakan “Aksi Bela Islam” mulai dari 4 November 2016 (414) sampai 2 Desember 2016 (212) yang juga menimbulkan cap “kafir” bagi mereka yang mendukung pasangan Basuki-Djarot dan haram untuk memilihnya. Dengan komposisi penduduk dan ormas islam yang banyak sehingga Jakarta kerap kali mudah untuk dibangun pola-pola untuk menggiring opini terkait identitas.

Ditambah dengan perkembangan sosial media yang begitu pesat, Kasus Ahok di Kepulauan Seribu menjadi besar dan membuat kebangkitan politik identitas. Melihat itu, Politik Identitas akhirnya dimanfaatkan oleh sekelompok elite politik dengan menyosor pada kalangan masyarakat “akar rumput” untuk kemudian dijadikan sebagai alat dalam meraih kekuasaan karena dengan komposisi penduduk yang bermayoritas islam dengan banyaknya da’i dan alim ulama disana sehingga mudah untuk dibangun isu identitas islam tersebut.

Dengan begitu, elite politik dapat dengan mudah menggunakan sentimen identitas dalam pemilihan umum, termasuk Pilkada DKI Jakarta. Tumbuhnya sentimen tersebut pada masyarakat Jakarta menjadi bukti bahwa masyarakat Jakarta masih mudah terombang-ambing oleh isu-isu seputar sentimen agama atau etnis dibandingkan dengan melihat ide atau prospek kinerja para calon pemimpinnya.

Kemenangan Pasangan Anies Baswedan – Sandiaga Uno menjadi bukti akan keberhasilan penggunaan identitas agama sebagai faktor kuat sebagai basis untuk meraih suara. Penggunaan

politik identitas pada saat itu menjadi sangat subur karena dilakukan secara intens dalam bentuk interaksi simbolik untuk menggalang dukungan massa. Ditambah dengan elite-elite parpol maupun ormas yang memiliki kepentingan bersama sehingga menambah sentiment identitas itu semakin terdengar oleh publik.

Selain besar peran elite politik dan ormas dalam menumbuhkan sentimen identitas di masyarakat, mungkin juga ada keterlibatan lembaga keagamaan yang menjadi salah satu aktor politik penggerak suara publik, mengingat dalam meraih simpati publik, banyak pasangan calon yang mengunjungi tempat ibadah atau lembaga keagamaan entah untuk kegiatan kampanye atau hanya berkunjung saja yang jelas hal tersebut terindikasi untuk menarik suara pemilih karena dalam suasana pemilihan umum.

Meski begitu, sentuhan agama yang dibangun pada Pemilihan Gubernur DKI 2017 kemarin bukan semata-mata dari relawan resmi pasangan Anies-Sandi, melainkan relawan yang tidak terdaftar di KPU. Sedangkan untuk relawan resmi, konsultan, maupun tim kampanye justru tetap mempertahankan kampanye menggunakan program kerja, namun dikarenakan kasus pencemaran saat itu menjadi *trend* maka yang terlihat hanyalah penggunaan politik identitas untuk memenangkan kontestasi pemilihan yang mana sebenarnya para calon tersebut hanya menikmati situasi penggunaan politik identitas yang terjadi di kalangan masyarakat dan politisi.

Memasuki Pemilihan Presiden 2019 penggunaan politik identitas mulai mengalami penurunan dikarenakan masyarakat yang sudah tidak mepedulikan identitas bagi para calon. Selain itu pada Pemilihan Presiden 2019 lalu tidak ada “sosok” yang bisa dilawan, artinya bahwa kita melihat sendiri calon yang bertarung memiliki agama yang sama yaitu Islam, sehingga tidak ada celah untuk bisa menaikkan isu mengenai identitas agama islam.

Isu agama yang tidak berhasil dinaikkan membuat masyarakat tidak lagi mempersoalkan urusan-urusan agama, namun dengan KH Ma'ruf Amin sebagai pendamping Jokowi membuat suasana pada saat itu terlihat seperti "pertarungan umat islam". Meskipun KH. Ma'ruf amin terpilih, dengan sosok simbol islam NU yang kuat, tetapi tim pemenangan Jokowi-Amin kala itu masih mengedepankan program kerja serta visi misi. Sama seperti tim lawan Prabowo-Sandi yang juga mengedepankan program kerja dan visi misi

Dipilihnya KH Ma'ruf Amin sebagai wakil bukan semata-mata akibat dari politik identitas, melainkan komitmen dengan partai-partai politik pengusung, jika dibandingkan sekitar 30% akibat politik identitas dan 70% karena komitmen dengan partai pengusung. Penyampaian program kerja serta visi misi merupakan hal yang wajar dilakukan, dengan begitu masyarakat bisa memilih secara rasional siapa calon pemimpin yang akan mereka pilih kelak dan masyarakat juga bisa mengawasi, menjaga, dan terus menagih janji-janji calon pemimpin yang mereka pilih.

Kajian mengenai Politik Identitas ini menjadi menarik dikarenakan mulai mencuat ke permukaan pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu yang merupakan barometer bagi daerah lain di Indonesia. Politisasi identitas sebagai agenda politik utama dalam pemilihan umum daerah tersebut bisa saja menjadi contoh bagi elite politik di daerah lain yang memiliki sentiment kuat, seperti Aceh, Ambon, dan Papua.

Pengemasan atau penggunaan politik identitas oleh para calon pemimpin daerah maupun pemimpin negara merupakan hal yang wajar dilakukan, karena hal itu bersifat permanen, artinya akan tetap digunakan sepanjang pemilihan kepala daerah maupun negara karena sentiment agama di Indonesia ini masih kuat. Namun hal itu harus dibarengi dengan memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat, karena dalam kacamata politik tidak bisa melihat dari satu sisi saja melainkan

hurs melihat dari berbagai sisi, tidak hanya emosionalitas saja tetapi juga harus melihat rekam jejak.

Dengan politik identitas yang kerap kali dijadikan alat komditi dalam berpolitik akhirnya menimbulkan kecurigaan antara masyarakat itu sendiri sehingga politik identitas itu akhirnya digunakan sebagai alat serang satu dengan lainnya, masyarakat saling konflik, tidak rukun, kehilangan ruh keindonesiaannya seperti gotong royong dan saling membantu, semua itu hilang akibat penggunaan identitas agama yang berlebihan.

Namun ketika penggunaan identitas itu membludak justru menimbulkan rasa nasionalitas yang tinggi, terlihat para elite politik itu untuk ikut mengademkan suasana begitu juga dengan TNI-Polri yang ikut membantu mendamaikan suasana. Meski begitu, seharusnya para politisi yang sering menggembar gemborkan tentang Pancasila harusnya benar-benar diterapkan di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural.

Karena di dalam Pancasila itu sendiri memiliki nuansa identitas yang tinggi, basis agama pada sila pertama berbicara mengenai Ketuhanan, dimana paham Tauhid dimasukkan ke dalam Pancasila. Bahkan menurut pengamat, polarisasi yang terjadi semata-mata bukan hanya karena politik identitas yang terus menerus dibangun, tetapi ada faktor lain seperti wacana 3 periode dan hubungannya dengan undang-undang pemilu yang memberikan ambang batas presidential threshold tentang 20% kursi suara yang boleh mencalonkan presiden kecuali PDIP.

Melihat situasi politik yang terjadi dalam rentan waktu 2017 hingga 2019, pelajaran penting dari Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 ialah jangan menyinggung keyakinan, karena kalau berbicara keyakinan itu akan mengalahkan segalanya, terlebih di Indonesia yang secara pedoman

beragama cukup kuat. Karena masyarakat Indonesia masih banyak yang menjadikan agama sebagai pedoman hidup, sehingga ketika pedoman itu disinggung mereka akan bereaksi.

Hal tersebut juga dikhawatirkan akan berdampak pada merosotnya indeks demokrasi di Indonesia, karena orientasi pemilih akan bergeser pada kesamaan identitas. Jika hal tersebut terus berlanjut maka bukan tidak mungkin akan terjadi konflik dalam skala regional maupun nasional, terjadinya ketegangan hubungan antar masyarakat. Politisasi identitas itu akan terus ada jika tidak ada nya pengakuan antar kelompok dan dapat menjadi bahaya laten yang dapat menggerogoti keberagaman di Indonesia.

Inilah tantangan ke depan bagi pemerintah dan partai politik untuk memberikan Pendidikan politik yang baik sehingga dapat mengembangkan dimensi pengakuan melalui dialog antar kelompok sehingga politisasi identitas tidak dapat tumbuh di masyarakat juga untuk menjaga keutuhan persatuan bangsa. Mengapa begitu? Karena segala aktifitas kehidupan tidak lepas dari politik, dengan adanya politik memberikan efek yang sangat signifikan terhadap perubahan di dalam tatanan masyarakat, merubah peradaban, dimana politik itu merupakan salah satu alat maupun kendaraan yang dimana ketika didalamnya dapat memperjuangkan kebaikan, tidak hanya mewakili satu kalangan saja tetapi mewakili semua.

Sebuah kontestasi pemilihan yang baik dan sehat pada umumnya ialah pertarungan secara *head to head*, artinya berbicara program, bicara rekam jejak, bicara visi dan misi, dengan kasus yang ada pada Pemilihan Gubernur DKI 2017 lalu akhirnya mengaburkan semua itu, batas-batas terlewati, program jadi terasa bias dan masyarakat lebih mengedepankan sisi emosional dibanding rasional untuk memilih calon pemimpin. Begitu juga di media sosial dimana masyarakat saling serang, hal itu menandakan bahwa kesadaran dalam berpolitik masyarakat Indonesia masih kurang.

Sehingga kesimpulannya ialah jangan main-main di “wilayah api” untuk para calon karena ketika berbicara keyakinan setiap orang mempunyai itu dan ketika disinggung pasti akan memicu reaksi yang beragam. Dengan kondisi multikultural Indonesia ini, seorang pengamat akademik yaitu pak Fachrudin justru memberikan pertanyaan, yaitu *“dengan zaman yang semakin berkembang, kira-kira bisa gak ya demokrasi kita yang pluralistic tapi dengan basis keragaman?”* dan pertanyaan tersebut yang belum bisa penulis jelaskan pada penelitian ini.

